



YAYASAN SYAIFATUN NISA CILANGKAP
Akte Notaris : Lola, S.H., M.Kn. No 23 Tanggal 22 Juli 2020
SK Kemenkumham RI Nomor. AHU-0011900.AH01.04.Tahun 2020
Skretariat: Jl. KH. Ali Alwini Km. 07, Kp. Cilangkap, Des. Cilangkap-Kalanganyar

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 421.1/001/YSC-LBK/VII/2020

TENTANG
PENDIRIAN TAMAN KANAK – KANAK (TK) MANDIRI CILANGKAP

- MENIMBANG :** a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
b. Bahwa dengan Paud akan menampung anak usia 2 sampai 6 tahun untuk mendapatkan Pendidikan.
c. Bahwa berdasar butir a dan butir b diatas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Desa Cilangkap
- MENGINGAT :** a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah
b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Ksejahteraan Anak
c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak
e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak
f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
h. Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN**
- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak Mandiri Cilangkap yang beralamat di Kp. Cingkap Rt/Rw 05/02 Desa. Cilangkap
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola Taman Kanak – Kanak Mandiri Cilangkap untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Persiapan, Pelaksanaan sampai Pelaporan.
- KETIGA** : Biaya Pelaksanaan kegiatan ini di bebankan kepada pihak Pengelola/Penyelenggara, Swadaya Masyarakat dan dana yang relevan.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Lebak

Pada Tanggal : 23 Juli 2020

Ketua Yayasan Syaifatun Nisa Cilangkap

AHMAD UKON MUKRONI

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak
2. Korwi Kecamatan kalanganyar
3. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

DINAS PENANAMAN MODAL

Jalan RM. Nataatmaja No. 5 Telp. (0252) 202772 Rangkasbitung 42312

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL KABUPATEN LEBAK

Nomor : 503/7-PAUD/DPM/2021

Lampiran : -

TENTANG:

PERSETUJUAN KOMITMEN IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN
(PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL KABUPATEN LEBAK,

Menimbang : a. bahwa lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), sebagaimana diamanatkan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, maka dalam menyelenggarakan proses pembelajaran harus memiliki perizinan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Kabupaten Lebak tentang Persetujuan Komitmen Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan (Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal) ;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang –Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2007 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2020 Nomor 5);
16. Peraturan Bupati Lebak Nomor 95 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Terintegrasi;
17. Peraturan Bupati Lebak Nomor 116 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2020 Nomor 117);

- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 087/U/2002 tentang Akreditasi Sekolah;
3. Surat permohonan dari Ketua Yayasan Syaifatun Nisa Cilangkap Nomor : 421.1001/TK-MC/XII/2020 perihal Permohonan Ijin Operasional;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

- : Memberikan Persetujuan Komitmen Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan (Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal) di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak kepada :
- | | | |
|----------------------------|---|--|
| Nama Lembaga Pendiri | : | Yayasan Syaifatun Nisa Cilangkap |
| Nama Lembaga PAUD | : | Taman Kanak - Kanak Mandiri Cilangkap |
| Nomor Induk Berusaha (NIB) | : | 0263010232927 |
| N P W P | : | 96.861.830.6-419.000 |
| Alamat | : | Jalan KH. Ali Alwini Km. 07 RT/RW 005/002
Kel. / Desa Cilangkap Kec. Kalanganyar Kab. Lebak |
| No. Telp/HP | : | 085695811070 |
| No. Fax/Email | : | jurjaniahmad123@gmail.com |
| Titik koordinat lokasi | : | Bujur (E) : 106,20804039684313
Lintang (S) : -6,370773457084194 |

KEDUA

- : Penanggung jawab atau pengelola menyampaikan laporan penyelenggaraan pendidikan pada lembaga yang bersangkutan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku kepada Bupati Lebak atau Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, dengan tembusan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Kabupaten Lebak;

KETIGA

- : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan penyelenggaraan Satuan PAUD secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;

KEEMPAT

- : Pemberian persetujuan komitmen izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini berlaku sampai dengan adanya pencabutan dan masih memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku, apabila ada perubahan harus mengajukan permohonan izin baru;

KELIMA

- : Apabila di kemudian hari dalam hal Penyelenggaraan Pendidikan pada lembaga yang bersangkutan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, maka dapat dikenakan sanksi administratif dan pemberian izin akan ditinjau kembali.

KEENAM

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Dikeluarkan di : Rangkasbitung
Pada Tanggal : 19 April 2021

**a.n. BUPATI LEBAK
KEPALA DPM KABUPATEN LEBAK**



YOSEP MOHAMAD HOLIS, S.Hut., M.T. M.Sc
NIP. 19751221 200003 1002

Tembusan :

1. Yth. Bupati Lebak.
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak.
4. Yth. Camat Kecamatan Kalanganyar Kabupaten Lebak.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh BSrE